



## **Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999**

Nisfi Sulpina<sup>1</sup>

*Pendidikan Sejarah/FKIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Rangkasbitung, Indonesia<sup>1</sup>*

### **RIWAYAT ARTIKEL**

*Sejarah artikel:*

Diterima 1 Desember 2022

Diterima dalam bentuk revisi

10 Desember 2022

Diterima 12 Desember 2022

### **ABSTRAK**

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste dari tahun 1975-1999 tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan”. Namun pada kenyataannya “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan” itu menjadi terbalik dan Indonesia yang melakukannya pendudukan di Timor Timur. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dan studi literatur sebagai teknik penelitiannya. Metode sejarah mempunyai beberapa tahapan diantaranya yaitu: 1) heuristik atau pengumpulan sumber, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, dan 4) historiografi atau penulisan peristiwa sejarah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekejaman yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste. Dan hasil dari penelitian ini yaitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste, bahkan telah menelan banyak korban. Pelanggaran tersebut seperti pembunuhan, penganiyaan, kekerasan pada wanita, dan juga pemindahan anak Timor Timur.

*Kata kunci:*

Konflik; Indonesia; Timor Leste

### **PENDAHULUAN**

Merdeka merupakan keinginan semua bangsa untuk terbebas dari penjajahan suatu negara. Kekayaan, kebebasan dan lain sebagainya dirampas oleh pihak-pihak yang menguasai atau mengkolonisasi daerah jajahannya. Berbagai cara dilakukan negara yang terjajah agar terbebas dari suatu penjajahan tersebut. Hal itu sama seperti apa yang telah terjadi di Timor Timur atau yang sekarang disebut dengan Timor Leste.

Timor Timur pada abad 16 merupakan daerah kekuasaan Portugis. Namun, pada tahun 1974 terjadi kudeta militer yang terjadi di Lisabon ibukota Portugis atau peristiwa itu disebut dengan istilah Revolusi Bunga. Dengan adanya peristiwa tersebut tidak memungkinkan lagi Portugis untuk tetap bertahan didaerah kekuasaannya di Timor Timur.

*Nisfisulpina@gmail.com*

©2023. Nisfi Sulpina. Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Setia Budi Rangkasbitung

Oleh karena itu, Portugis kemudian merundingkan untuk menentukan nasib masa depan Timor Timur. Dan kemudian pada 17 Juli 1976 Timor Timur secara resmi masuk kedalam teritorial Indonesia dan menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976, tanggal 17 Juli 1976. Dalam undang-undang tersebut dimuat penyatuan wilayah Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (Lapian & Chaniago, 1988).

Sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), banyak berdiri partai-partai politik seperti UDT (*Uniao Democratica Timorese*), ASDT (*Associacao Popular Democratica Timorese*) yang kemudian berganti menjadi Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*), Apodeti (*Asosiacao Popular Democratica Timorese*), KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*), dan Trabalista. UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista merupakan partai politik yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Sedangkan Fretilin merupakan partai politik pro kemerdekaan, Fretilin juga merupakan salah satu partai politik yang berhaluan komunis.

Setelah diumumkannya bahwa Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Fretilin tetap berusaha untuk menjadikan Timor Timur sebagai negara yang merdeka dan tetap melakukan perlawanan. Indonesia pada saat itu dibawah kekuasaan presiden Soeharto, bahwasanya setiap ada yang menentang terhadap pemerintah Indonesia akan dilakukan perlawanan juga.

Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada saat itu banyak melakukan pelanggaran HAM. Terutama pada peristiwa Santa Cruz pada tahun 1991 dan juga pada pasca jajak pendapat pada tahun 1999 yang dilakukan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hasil jajak pendapat tersebut sebagian besar memilih untuk merdeka daripada berintegrasi dengan Indonesia.

Banyak sekali korban jiwa dari peristiwa Santa Cruz dan pasca jajak pendapat yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan Indonesia. Laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa Santa Cruz menewaskan warga ribuan warga sipil. Sedangkan laporan lainnya menyebutkan bahwa ratusan luka-luka dan puluhan tewas.

Sedangkan peristiwa jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 telah menelan korban baik dari pihak pro-otonomi maupun pihak pro-kemerdekaan. Beberapa dari mereka meninggal, luka-luka atau harus mengungsi. Kejahatan yang terjadi antara lain adalah pembunuhan, penganiayaan, kekerasan pada wanita dan pemindahan anak Timor Timur. Sepanjang jajak pendapat tahun 1999, telah tercatat setidaknya 5297 orang, yang terdiri dari 149 orang tewas, 4 orang luka-luka, 5150 orang mengungsi dan 23 kejahatan terhadap wanita (Suartika, 2015).

Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur. Secara tidak langsung hal tersebut merupakan penjajahan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Dan hal itu juga tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pertama yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2023).

Mengapa hal demikian bisa terjadi? Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penjajahan Indonesia Terhadap Timor Leste”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kekejaman yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah, dengan teknik studi literatur sebagai teknik penelitiannya. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau termasuk didalamnya metode dalam menggali, memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut (Gottchalk, 1986:32 dalam (*PERKEMBANGAN ISLAM DI KOREA SELATAN (1950-2006)*, 2006)).

Metode penelitian sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi merupakan penafsiran penulis terhadap fakta yang di temukan, dan historiografi yaitu penulisan kisah sejarah (Hamid & Madjid, 2018).

Dengan melalui tahapan-tahapan metode penelitian tersebut, pertama penulis melakukan pengumpulan sumber atau heuristik baik itu sumber primer maupun sekunder. Sumber didapatkan dari buku, jurnal imial, atau pun video dari youtube. Kemudian penulis kritik sumber tersebut mana yang paling relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya penulis interpretasi fakta yang didapatkan dari sumber-sumber yang dipilih. Barulah terakhir tahapan penulisan peristiwa sejarah atau historiografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur pada abad 16 dikuasai oleh Portugis. Namun negara kolonial tersebut pada 25 April 1974, terjadi sebuah insiden yang membuat Portugis harus melepaskan daerah kekuasaannya termasuk Timor Portugis atau Timor Timur yaitu insiden kudeta militer atau sebutan lainnya adalah Revolui Bunga di Lisabon ibukota Portugis.

Revolusi Bunga Anyelir ( bahasa Portugis : *Revolução dos Cravos* ), juga dikenal sebagai 25 April (bahasa Portugis: *25 de Abril* ), adalah sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh perwira militer berhaluan kiri yang menggulingkan rezim otoriter Estado Novo pada tanggal 25 April 1974 di Lisbon, menghasilkan perubahan besar dalam bidang sosial, ekonomi, teritorial, demografi, dan politik di Portugal dan koloni luar negerinya melalui Processo Revolucionário Em Curso. Hal ini mengakibatkan transisi Portugis menuju demokrasi dan berakhirnya Perang Kolonial Portugis (*Revolusi Bunga Anyelir*, 2023).

Dari insiden tersebut, Portugis harus menyerahkan kekuasaannya dan menentukan nasib Timor Timur. Mendengar pengumuman tersebut para elit di Timor Timur mulai mendirikan berbagai perhimpunan, antara lain UDT (Uniao Democratica Timorensis), KOTA (Klibur Oan Timor Aswain), Apodeti (Asosiacao Popular Democratica Timorensis) dan Fretelin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente). Fretelin yang dulunya bernama ASDT (Associacao Popular Democratica Timorensis) merupakan partai revolusioner dan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan TimorTimur (Suartika, 2015).

Sikap Indonesia pada saat itu cukup berhati-hati, karena Indonesia sangat mengkhawatirkan jika ada yang berpendapat bahwa Indonesia ingin memperluas wilayah teritorialnya. Pada tingkat pertama penjajahan dilakukan melalui jalur diplomatik. Umpamanya, dalam rangka menghadiri sidang PBB, Menteri Luar Negeri yang waktu itu dijabat oleh Adam Malik, telah mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Portugal Mario Soares, tanggal 21 September 1974 (Lapian & Chaniago, 1988).

Indonesia dalam sidang PBB terus meyakinkan sikapnya terhadap Timor Timur bahwa Indonesia tidak bermaksud untuk memperluas teritorialnya. Menghadapi perkembangan yang terjadi di Timor Timur, Indonesia sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan struktural, serta GBHN sebagai pedoman penentu sikap dan arah tindakan, melalui Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, Presiden Soeharto dengan resmi menyatakan “Sikap Dasar” Indonesia terhadap masalah Timor Timur sebagai berikut (Kristiadi, 1996):

- a. Tidak mempunyai ambisi teritorial; 934 ANALISA 1986 – II
- b. Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri;
- c. Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan akan menjadi sebagian wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Presiden Soeharto kemudian mengirim utasan pribadinya Letjen TNI Ali Murtopo untuk menjelaskan sikap Indonesia kepada pemerintah Portugal di Lisbon. Dari pendekatan itu, Indonesia melihat tiga alternatif dalam penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu (Djoened Poesponegoro & Notosusanto, 2008):

- a) Merdeka dibawah naungan Portugal
- b) Bergabung dengan Indonesia
- c) Merdeka penuh

Mendengar hal itu, partai-partai seperti UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalista tertarik untuk berintegrasi dengan Indonesia. Dan terus mendesak Indonesia agar Timor Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sampailah pada 17 Juli 1976 Timor Timur secara resmi masuk kedalam teritorial Indonesia dan menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia.

### **Kekejaman Indonesia Terhadap Timor Timur**

Setelah pendudukan Portugis berakhir, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Timor Timur menghadapi babak baru yaitu pendudukan Indonesia. Pendudukan Indonesia di Timor Timur dimulai pada tahun 1975 dan berlangsung sampai 1999.

Konflik antara Indonesia dan Timor Timur terjadi pada peristiwa operasi seroja, Santa Cruz, dan jajak pendapat, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Operasi Seroja**

Operasi Seroja merupakan operasi lintas udara terbesar yang pernah dilakukan militer Indonesia. TNI AU berperan sebagai unsur udara yang mendukung Operasi Seroja (Ervanda & Zulkarnain, 2016). Operasi Seroja melibatkan ABRI yang terdiri dari Angkatan

Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian. Seluruh pasukan berperan penting dalam upaya membantu kelompok pro integrasi menghadapi Fretilin.

Pada tahun 1974, revolusi Bunga di Portugal mengakibatkan perubahan rezim di negara tersebut. Di tengah ketidakstabilan politik Portugal, beberapa koloni Portugal, termasuk Timor Timur, menyatakan kemerdekaan. Namun, pada bulan Desember 1975, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melakukan intervensi militer di Timor Timur dengan melancarkan Operasi Seroja.

Dengan menggunakan sandi Operasi seroja, pasukan Indonesia memasuki Timor Timur karena adanya desakan Amerika dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunis tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, masuknya pasukan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah (Manis, 2016).

Pertengahan tahun 1975 konflik bersenjata di Timor Timur semakin memanas, terutama antara Fretilin dan UDT. Puncak konflik ini terjadi pada bulan November 1975, hal ini mengubah perjalanan lobi Pemerintah Indonesia dari pendekatan politik menjadi aksi militer. Aksi militer diambil karena konflik di Timor Timur semakin tidak terkendali. Fretilin menguasai jabatan-jabatan penting di Timor Timur pada pertengahan tahun 1975. Perang saudara pecah pada bulan Agustus 1975 ketika UDT melakukan usaha kudeta yang kemudian dilawan Fretilin dengan dukungan militer Portugal yang ada di Timor Timur (Ricklefs, 2005).

Pada tanggal 17 Desember 1975, satuan Tentara Nasional Indonesia mulai melintasi perbatasan dekat Atambua, menandai dimulainya Operasi Seroja. Sedangkan kontak langsung dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai pada 27 Desember 1975. Pertempuran paling dahsyat terjadi di Baucau pada tanggal 18 sampai dengan 29 September 1976. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos tahun 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung TNI selama beberapa hari.

Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama Operasi tersebut berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang, sementara korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil (Manis, 2016).

## 2. Insiden Santa Cruz

Integrasi Timor Timur ke Indonesia tidak menghentikan perlawanan yang dilakukan Fretilin. Pembukaan daerah Timor Timur menimbulkan kesenjangan sosial sehingga dimanfaatkan oleh pihak Fretilin untuk mempengaruhi putra daerah Timor Timur agar menentang integrasi. Provokasi yang dilakukan Fretilin memicu terjadinya demonstrasi yang bersifat anarkis dan mengakibatkan korban jiwa. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) karena berita tentang insiden Santa Cruz telah menyebar ke negara lain dan banyak negara menganggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM (Arifianto & Zulkarnain, 2016).

Peristiwa berdarah dikuburan Santa Cruz dikenal dengan istilah insiden Santa Cruz. Peristiwa itu disebabkan karena adanya bentrokan anti integrasi dan pro integrasi dan juga petugas keamanan Indonesia. Pada 28 Oktober 1991, ketika demonstrasi besar-besaran dan kebanyakan dari kalangan mahasiswa terhadap Indonesia yang menembak mati Sebastio Gomez.

Peristiwa itu bermula ketika delegasi parlemen Portugal berniat mengunjungi daerah Timor Timur dan akan diikuti 12 jurnalis internasional. Mendengar hal tersebut, Indonesia keberatan bila kunjungan disertai dengan para jurnalis. Dilain pihak, para pemuda Timor Timur melakukan perlawanan bawah tanah dan menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal, namun hal tersebut tidak diketahui oleh Indonesia. Pemuda tersebut membuat spanduk-spanduk penyambutan di gereja Moteal di Dili dan diawasi oleh pihak intelijen Indonesia.

Pihak Intelijen Indonesia membuat skenario agar bisa menyulut aktivis pro kemerdekaan dengan menyewa para provokator. Pada 27 Oktober 1991, para provokator tersebut mengejek aktivis pro kemerdekaan dan memancing keributan dan akhirnya para aktivis terpancing dan terjadilah perkelahian pada hari itu juga.

Pada 28 Oktober 1991, jasad Sebastio Gomez ditemukan tergeletak didekat Gereja Moteal. Dan pada 12 November 1991, ribuan umat katolik Timor Timur memperingati kematian Sebastio Gomez di Gereja Moteal di Dili atau disebut juga Misa Arwah. Setelah misa arwah tersebut berlangsung, sekitar 500 orang keluar dari gereja dan berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz tempat Sebastio Gomez dimakamkan sambil membentangkan spanduk yang bergambar Xanana Gusmao yang merupakan pemimpin Fretilin.

Semampainya di pemakaman, tentara Indonesia telah bersiaga dan kemudian menembaki masa dengan membabi buta diikuti berondongan senapan otomatis. Tentara Indonesia juga menembak ke arah kerumunan dan membuat aktivis pro kemerdekaan tertembak, tentara yang lainnya menendang dan menusuk hingga terluka. “Demonstrasi 12 November pecah menjadi huru hara ketika sejumlah demonstran terlibat pertengkaran dengan Kapten Gerhan Lentara yang mengakibatkan perwira ini terluka. Tak lama kemudian di muka kuburan Santa Cruz, sejumlah pasukan tak dikenal, tanpa insignias dan tanda-tanda kemiliteran yang jelas, menghadang di seberang gerbang pemakaman. Sebagian melepas tembakan peringatan, sebagian langsung menembaki para demonstran. Massa pemuda terkurung di tengah pekuburan, lari, dan kacau balau. Menurut penyidikan diduga sekitar 313 tewas, banyak di antaranya hilang. Menurut Sintong selaku Pangdam Udayana IX selaku penanggung jawab teritorial bahwa penembakan dilakukan oleh “Pasukan Liar” atau dikenal dengan sebutan SGI (singkatan dari Sat Gas Intelijen (Intelligence Task Force))(Khatulistino, 2015).

Dari aksi yang dilakukan tentara Indonesia itu, telah banyak terjadi korban jiwa. Laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November 1991 banyak menewaskan ribuan warga sipil, dan laporan lainnya menyebutkan rausan luka-luka dan puluhan tewas.

Setelah Santa Cruz, senator Amerika Serikat meminta presiden Georgi Bush Sr agar membantu Timor Timur Merdeka. Namun, Indonesia mengabaikannya dan mengubah struktur militer di Timor Timur dan juga tidak menarik mundur tentara Indonesia tersebut.

### **3. Jajak Pendapat**

Tahun 1991, saat Indonesia berada dibawah pemerintahan presiden Soeharto, Timor Timur tetap dipertahankan supaya tidak lepas dari Indonesia. Namun iklim politik di Indonesia juga berkembang dengan cepat, saat rakyat Indonesia merasa tidak puas akan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden Soeharto karena telah banyak terjadi korupsi dan kasus HAM yang diabaikan. Akhirnya tahun 1998 reformasi terjadi di Indonesia. Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya oleh rakyat Indonesia, dan Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, permasalahan Timor Timur diselesaikan dengan diberikannya opsi otonomi luas. bagi

wilayah tersebut, sehingga rakyat Timor Timur memiliki kewenangan luas dalam bidang politik dan ekonomi, namun dalam hal politik luar negeri dan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat (Suartika, 2015).

Namun hal ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat Pro-kemerdekaan. Karena hal ini hanya akan memperpanjang masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Oleh karena itu, pada 27 Januari 1999, Indonesia memutuskan untuk lepas tangan atau memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur jika rakyat Timor Timur menolak opsi pertama yaitu tawaran otonomi khusus yang sangat diperluas (Hijriani, 2010).

Selanjutnya, Indonesia dan Portugal pada 5 Mei 1999 memeberikan kesempatan kepada Timor Leste untuk menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan jajak pendapat yang akan dilaksanakan oleh PBB. Kemudian jajak pendapat dilaksanakan pada 30 Agustus 1999.

Hasilnya, sejumlah 344.580 suara (78,5%) memilih merdeka, dan sejumlah 94.388 suara (21,5%) memilih otonomi. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya setelah hampir 24 tahun berada dibawah kekuasaan Indonesia (Hijriani, 2010).

Setelah jajak pendapat dilaksanakan, keadaan Timor Leste tidak semakin membaik. Karena pihak integrasi merasa kecewa dengan hasil yang didapat. Pasca pengumuman, milisi pro-Indonesia mengamuk dan melakukan kerusuhan, serta penghancuran jalan, aliran listrik dan air, dan infrastruktur telekomunikasi. Situasi yang sempat damai ketika referendum berjalan, kembali bereskalasi pasca hasil referendum diumumkan (Suartika, 2015).

Sesudah terjadinya konflik pada kurung waktu seputar jajak pendapat di bulan Agustus 1999 di Timor Timur, yang kini menjadi Timor Leste, permasalahan kekerasan terhadap kemanusiaan mulai dilakukan penyelidikan. Penyelidikan diprioritaskan pada lima kasus, yaitu pembunuhan masyarakat sipil di gereja di kota Liquica tanggal 6 April 1999, penyerangan rumah Manuel Carracaslao di Dili tanggal 17 April 1999, pembunuhan masyarakat sipil yang mencari perlindungan di geraja Suai pada 6 September 1999, penyerangan kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999 dan pembunuhan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes pada 23 September 1999 (Firmandiaz, 2020).

Pendudukan Indonesia di Timor Leste tidak sesuai dengai apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiann dan peri-keadilan”.

Awalnya Indonesia yang berkeinginan untuk menghapuskan penjajahan dan juga paham komunis, namun keadaan itu membuat Indonesia banyak melakukan pelanggaran HAM dan banyak memakan korban jiwa di Timor Timur yang sekarang Timor Leste.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Undang-undang yang dirumuskan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata tidak membuatnya sadar. Akan tetapi juga berperilaku demikian yaitu menduduki suatu wilayah atau dengan kata lain penjajahan. Peristiwa-peristiwa yang begitu kelam di Timor Leste atas pendudukan Indonesia adalah peristiwa Operasi Seroja, Insiden Santa Cruz, dan paska Jajak Pendapat. Banyak sekali korban jiwa dari peristiwa Santa Cruz dan pasca jajak pendapat yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan Indonesia. Laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa Santa Cruz menewaskan warga

ribuan warga sipil. Sedangkan laporan lainnya menyebutkan bahwa ratusan luka-luka dan puluhan tewas.

Saran dari penulis pada peristiwa tersebut yaitu jangan menduduki suatu wilayah atau negara untuk kepentingan sendiri. Belajarlah pada peristiwa sejarah yang pernah di alami. Indonesia bertahun-tahun pernah dijajah oleh negara lain, namun mengapa Indonesia juga menjajah negara lain. Seharusnya itu hanya cukup menjadi pelajaran, bukan untuk dijadikan balas dendam kepada negara lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada orang tua penulis yang telah mendukung atas penyusunan penulisan karya ilmiah ini baik dari tenaga, dana dan juga doa. Dan juga penulis ucapkan kepada teman yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

## REFERENSI

- Arifianto, A., & Zulkarnain. (2016). Dampak Insiden Santa Cruz Tahun 1991 Di Timor Timur Terhadap Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat Tahun 1992-1995. *Risalah*, 3(11).
- Djoenned Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (VI). Balai Pustaka.
- Ervanda, B. Y., & Zulkarnain. (2016). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(TNI-AU) dalam Operasi Seroja Di Timor Timur Tahun 1975-1979. *Risalah*, 3(9).
- Firmandiaz, V. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HA Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur ). *Res Publica*, 4(1), 92–105.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ombak.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9). [http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)
- Hijriani, K. (2010). *KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 1999*.
- Khatulistino, E. (2015). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Kasus Inside Santa Cruz 1991 di Timor Timur Oleh Pemerintah Indonesia. *Gloria Juris*, 3, No.
- Kristiadi, J. (1996). Timor Timur. *Encyclopaedia Britannica Inc, April*.
- Lapian, A. B., & Chaniago, J. R. (1988). *Timor Timur Dalam Gerak Pembangunan*. 116. <http://www.tamanmini.com/museum/museum-timor-timur-2?lang=en>
- LDKPI. (n.d.). *Timor Leste*. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Retrieved November 20, 2023, from <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-timor-leste>
- Manis, H. (2016). *SEJARAH DAN PENGETAHUAN DUNIA ABAD 20*. Trans Idea Publishing.
- PERKEMBANGAN ISLAM DI KOREA SELATAN (1950-2006)*. (2006).
- Priowidodo, O. G. (2014). Hakekat Kemerdekaan. *MITRA INDONESIA Edisi*, 75(112).
- Revolusi Bunga Anyelir*. (2023). Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Carnation\\_Revolution](https://en.wikipedia.org/wiki/Carnation_Revolution)
- Ricklefs, M. . (2005). *Sejarah Indonesia Modern (1200-2004)*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Suartika, T. (2015). Korban Jajak Pendapat di Timor Timur. *Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 15–24.
- Suharto. (2009). Pengembangan alliances. *Universitas Indonesia*, 1–12.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (2023). Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Wacana, B. (n.d.). *Makna Kemerdekaan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/buddha/makna-kemerdekaan-lFqQ8>